

Kepemimpinan Tradisional: Antara Kenangan dan Impian

oleh Marthen Manggeng

I.

Tahun 2004 merupakan babak baru dalam sejarah perjalanan kepemimpinan Bangsa Indonesia pada aras nasional. Untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih dan menentukan sendiri pemimpinnya melalui pemilihan presiden secara langsung. Selama berpuluh-puluh tahun rakyat Indonesia memilih pimpinan Nasionalnya dengan cara mewakili, walaupun sedikit secara paksa, kepada orang yang disebut wakil rakyat yang sesungguhnya juga tidak dipilih secara langsung. Namun masih ada sedikit kebanggaan sebab pada aras lokal yang disebut desa, pemilihan kepala desa secara langsung sudah berlangsung berpuluh tahun lamanya. Hasil dari "pesta demokrasi" itu telah menetapkan para pemimpin di berbagai tingkat kelembagaan. Di tangan mereka terletak penerapan nilai-nilai demokrasi yang telah menjadikan mereka sebagai pemimpin. Rakyat menunggu pembuktian mereka.



Di tengah semaraknya pemilihan pemimpin di berbagai tingkatan kelembagaan dalam negara Republik Indonesia (baik legislatif maupun eksekutif), ada fenomena lain yang cukup menarik untuk dikaji sekitar kepemimpinan dalam masyarakat Indonesia. Perebutan kekuasaan lewat jalur kepemimpinan tradisional di berbagai pusat kekuasaan tradisional di Indonesia makin sering terjadi, contoh yang masih segar dalam ingatan adalah dualisme kepemimpinan dalam keraton Kasunanan Surakarta. Selain itu, tidak sedikit para pemimpin dan calon pemimpin dalam jalur kepemimpinan modern dari berbagai tingkatan yang "mencari" gelar atau pangkat melalui jalur kepemimpinan tradisional. Sebut saja pemberian gelar Kanjeng Pangeran oleh Paku Buwono XII kepada KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) pada tahun 2002. Pemberian gelar Kanjeng Pangeran dan Kanjeng Pangeran Anom kepada Wiranto dan Akbar Tanjung (capres Partai Golkar) dan Amin Rais (capres PAN) pada tanggal 28

September 2003¹. Ada juga para pejabat gereja yang kemudian beralih dari jabatannya sebagai pelayan Tuhan menjadi pemimpin tradisional atau merangkap dua jabatan tersebut sekaligus (misalnya menjadi Parengnge', yaitu pemimpin tradisional Toraja). Mengapa fenomena-fenomena demikian semakin kerap terjadi dalam era modern saat ini? Apakah model kepemimpinan modern tidak relevan untuk masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dengan beragam model kepemimpinannya? Ataukah kepemimpinan yang relevan untuk masyarakat kita adalah gabungan antara dua model kepemimpinan, modern dan tradisional? Mungkin inilah yang sedang dicoba sebab sering menjadi syarat, walaupun tidak tertulis, seorang dapat dipilih menjadi pemimpin dalam organisasi modern termasuk dalam gereja jika orang tersebut adalah keturunan "darah biru" alias keturunan bangsawan. Tetapi benarkah dua model kepemimpinan yang dalam banyak hal bertentangan dapat dipadukan dalam sebuah lembaga atau organisasi? Bertolak dari realitas demikian, maka tulisan ini dibuat sebagai pikiran awal untuk mendorong para pembaca mengkaji fenomena tersebut lebih lanjut dan mendalam.

II.

Tata kepemimpinan tradisional diatur dalam sistem kemasyarakatan yang sumber atau proses terjadinya terkadang sulit dilacak/diketahui. Ia hanya merupakan dongeng yang diturun-alihkan secara lisan dari generasi ke generasi. Dalam mitos suku-suku yang menceritakan tentang asal-usul suatu masyarakat, ada kepercayaan bahwa sistem kemasyarakatan lahir bersamaan dengan penciptaan alam semesta dengan semua isinya termasuk manusia pertama. Dalam masyarakat Makassar, sistem seperti ini dimuat dan diatur dengan lengkap dalam *lontara*². Contoh lain adalah sistem kemasyarakatan di Toraja yang diyakini diberikan oleh dewa kepada manusia pertama. Sistem kemasyarakatan tersebut menyatu dengan sistem kepercayaan yang diatur dalam Aluk Sanda Pitunna = 7777 (secara harafiah berarti serba tujuh atau lengkap tujuh)³. Salah satu yang diatur dalam Aluk Sanda Pitunna adalah strata sosial⁴. Strata sosial tidak hanya dikenal dalam masyarakat



tradisional Toraja tetapi pada umumnya dalam suku-suku di Indonesia. Stratifikasi yang ada dalam masyarakat lokal sekaligus mencerminkan sistem pemerintahan (kepemimpinan) yang dianut dan dipraktikkan dalam masyarakat tersebut. Strata tertinggi pada umumnya adalah pemimpin yang paling berkuasa dan selanjutnya strata terendah merupakan kelompok masyarakat yang diperintah atau dikuasai bahkan terkadang disetarakan dengan harta milik yang dalam segala hal harus taat kepada pemimpinnya. Ketaatan kepada sang pemimpin merupakan keharusan sebab hal itu merupakan partisipasi dalam memelihara ketertiban yang telah ditentukan oleh seluruh sistem. Dalam hal ini seorang bangsawan/pemimpin ditempatkan sebagai wakil Tuhan di dalam dunia ini. Inilah sumber utama kewibawaan dan kekuasaan sang pemimpin.

Selain pokok yang dikemukakan di atas, yang menjadi sumber kewibawaan pemimpin, masih ada sumber-sumber yang lain yang tidak kalah pengaruhnya bagi seorang pemimpin. AA GN Ari Dwipayana dalam bukunya yang berjudul, *"Bangsawan dan Kuasa. Kembalinya Para Ningrat Di Dua Kota"*, menjelaskan beberapa sumber kekuasaan bangsawan di Surakarta dan Denpasar⁵. Sumber-sumber kekuasaan tersebut adalah:

- a. Kesatuan yang integral antara istana (keraton, pura, puri, tongkonan) dengan bangsawan. Istana memberikan makna politis yang sangat besar bagi seorang bangsawan (baca: pemimpin). Tanpa istana seorang bangsawan tidak mempunyai arti politis sama sekali. Karena itu, jika terjadi perebutan kekuasaan di dalam suatu kerajaan yang menjadi prioritas penalukkan adalah istana. Seseorang dinyatakan berkuasa atau menang jika ia menguasai dan bertempat tinggal dalam istana. Oleh Clifford Geertz yang dikutip oleh Dwipayana mengatakan bahwa status sosial seorang bangsawan akan merosot jika ia tidak mempunyai atau tidak berkedudukan di istana. Namun sebaliknya sebuah istana tidak akan dilihat sebagai lembaga politik yang penting jika tidak disertai dengan bangsawan/pemimpin yang trampil dalam memelihara kewibawaan istana.
- b. Penguasaan secara hegemonik pada level wacana kebudayaan. Menurut Dwipayana bahwa hal ini terjadi sebab istana merupakan sumber tunggal produksi wacana pengetahuan, kepercayaan, acuan sistem stratifikasi sosial, simbol status, gaya hidup, dan kesenian masyarakat. Upacara yang dilakukan
- c. Penguasaan basis ekonomi politik. Ekonomi politik yang dimaksudkan di sini berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Adam Smith yang pertama kali memperkenalkan istilah tersebut. Salah satu maksud Adam Smith memakai istilah ini adalah untuk membedakannya dengan Ekonomi Allah yang ada kaitannya dengan *providentia* Allah⁶. Kebijakan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kebijakan politik suatu kekuasaan⁷. Ekonomi dan kekuasaan hampir selalu berjalan berbarengan. Dalam sistem kepemimpinan tradisional bangsawan menjadi penguasa atas pengelolaan seluruh prasarana ekonomi milik kerajaan. Prasarana ekonomi yang paling dominan adalah tanah. Pada dasarnya tanah itu bukanlah milik pribadi tetapi merupakan tanah adat. Masing-masing tanah itu telah mempunyai peruntukannya sendiri-sendiri. Ada yang diperuntukkan sebagai tanah pertanian, ada untuk tanah peternakan, ada tanah yang diperuntukkan sebagai tempat pemukiman dan ada yang hanya untuk tempat menyelenggarakan upacara atau pesta. Semua dimaksudkan untuk membiayai seluruh kehidupan masyarakat di dalam wilayah kekuasaan tersebut dan terutama demi kepentingan istana. Walaupun pada hakekatnya tanah bukan milik pribadi, tetapi karena kekuasaan menyatu dengan istana dan seluruh miliknya, maka prakteknya tanah adalah milik penguasa. Hal ini yang kemudian banyak menjadi masalah pada saat berhadapan dengan ekonomi dan kepemimpinan modern. Runtuhnya kekuasaan tradisional menyebabkan terjadinya perebutan tanah milik kerajaan atau tanah adat.
- d. Penguasaan atas birokrasi dan pengadilan. Kekuasaan bangsawan tidak hanya terbatas pada tingkat kekuasaan tertinggi dalam istana tetapi ia juga menguasai birokrasi di bawahnya. Kontrol itu begitu kuatnya sehingga tidak ada pembangkangan terhadap



kekuasaan tertinggi. Kekuasaan yang “mutlak” tersebut diperkuat dengan penguasaan terhadap lembaga peradilan. Bahkan di beberapa suku, sang pemimpin pemerintahan sekaligus bertindak sebagai penegak hukum yang mengadili siapa saja yang dianggap bersalah. Menariknya sebab, walaupun pemimpin tradisional kelihatan sangat otoriter tetapi ada dalam aturan bahwa jika seorang bangsawan/pemimpin yang bersalah hukumannya jauh lebih berat dari pada rakyat biasa, walaupun dalam prakteknya terkadang ada substitusi hukuman.

III.

Gelar yang disandang oleh pemimpin tradisional memperlihatkan ciri dan model kepemimpinan yang diembannya. Gelar-gelar tersebut ada yang mencerminkan keilahian, pengayoman, perlindungan, pemeliharaan tetapi ada juga yang mencerminkan penguasaan. Gelar puang yang dipakai oleh umumnya bangsawan Toraja merupakan gelar yang berbau keilahian sebab nama ini dipakai untuk menyebut dewa. Namun ada gelar lain yang dipakai secara khusus untuk seorang pemimpin dalam suatu lembaga (*tingkatan pemerintahan dalam suatu wilayah kekuasaan*), yakni *To Parengnge'*. Kata *To Parengnge'* merupakan bentukan dari kata *To* yang artinya orang dan *rengnge'* yaitu alat atau anyaman yang terbuat dari rotan yang diikatkan pada bakul. Alat ini kemudian dipakai untuk menggendong bakul yang disangkutkan di dahi⁸. Dengan demikian *parengnge'* berarti orang yang menanggung orang lain. Yang ditanggung dalam pengertian ini mencakup seluruh aspek. Keamanan dan kesejahteraan merupakan tanggung jawab seorang *parengnge'*. Karena itu seorang *parengnge'* adalah orang yang kuat, berani, kaya, rela berkorban dan bijaksana.

Aspek moral adalah salah satu aspek yang cukup penting dalam kepemimpinan tradisional. Amiruddin Selle menjelaskan dengan sangat baik tentang pentingnya aspek moral dalam kepemimpinan tradisional dalam kepemimpinan Karaeng Galesong di Kerajaan Galesong.

“Dalam tatanan kepemimpinan elit lokal Karaeng Galesong, nampaknya tidak jauh berbeda dengan sistem kepemimpinan tradisional di beberapa kerajaan, seperti Kerajaan Gowa dan Tallo. Bahwa landasan utama dalam sistem kepemimpinannya senantiasa berpijak pada adat yang termaktub dalam lontara. Berdasarkan ajaran lontara itu, moral kepemimpinan bagi seorang raja atau

karaeng sangat mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, faktor moral merupakan faktor yang sangat menentukan berjaya dan tidak berjayanya seorang pemimpin, raja atau karaeng/penguasa di masyarakat. Moral merupakan landasan dan kriteria utama dari rakyat yang dipimpinnya. Apabila moral seorang pemimpin atau raja telah dinilai terpuji oleh rakyatnya, maka tidak diragukan lagi bahwa adat akan mendukungnya, pemimpin atau karaeng yang bersangkutan senantiasa mendapat simpati dari rakyatnya. Kesediaan berkorban dari anggota masyarakat, termasuk kerelaan mengorbankan harta bendanya dan bahkan jiwanya yang paling berharga, akan terus mendukung bila moral seorang pemimpin atau penguasa memperlihatkan pula kesediaan untuk berkorban guna kepentingan rakyatnya. Artinya sosok seorang karaeng senantiasa menjadi pelindung rakyatnya, tidak memperkosa hak rakyatnya, dan menyayangi rakyatnya seperti sang raja/karaeng menyayangi diri dan keluarganya. Sebaliknya, bila moral sang raja/karaeng, tidak terpuji seperti hanya mementingkan diri dan keluarganya saja, berlaku tidak adil dalam memutuskan perkara di masyarakat, egoistis, serakah (korup), menindas rakyat dan dikuasai oleh nafsu angkara murka. Maka tak ayal lagi sang raja yang bersangkutan akan dibenci oleh rakyatnya”⁹.

Dengan demikian, jelas bahwa seorang pemimpin ia tidak boleh bertindak dengan sewenang-sewenang tetapi bertindak sebijaksana mungkin.

Kepemimpinannya diarahkan demi kepentingan seluruh rakyat tanpa terkecuali dan bukan untuk diri dan keluarganya sendiri. Kepemimpinan yang demikian adalah kepemimpinan dalam rangka mengayomi, menuntun dan mensejahterakan seluruh rakyatnya. Kalau ada rakyat kesulitan dalam kehidupannya, maka sang pemimpin yang akan menolongnya. Di sinilah salah satu (mungkin satu-satunya) aspek positif dari strata sosial di mana bangsawan/pemimpin seperti “Puang” di Toraja turut menanggung biaya hidup hambanya. Hal inilah yang membuat banyak hamba atau bawahan merasa tergantung kepada tuannya, namun harus diakui pula bahwa ketergantungan seperti ini merupakan satu cara untuk mempertahankan kekuasaan terhadap para budak atau rakyat. Meskipun kekuasaan dalam kepemimpinan tradisional sangat otoriter tetapi kepercayaan terhadap tuan dapat menjadi luntur. Pemimpin yang tidak mengindahkan tata krama dan norma-norma moral yang telah diatur dalam adat akan menyebabkan

berkurangnya dukungan dan rasa simpati dari rakyatnya.

IV.

Walaupun harus diakui bahwa pewarisan kepemimpinan dalam masyarakat tradisional sepenuhnya didasarkan pada stratifikasi sosial, tetapi tidak berarti bahwa semua keturunan bangsawan secara otomatis akan menjadi pemimpin. Seorang yang “diangkat” menjadi pemimpin adalah kader yang telah mengetahui segala seluk-beluk aturan dan tata cara menjadi pemimpin. Pengetahuan yang demikian tidak datang dengan sendirinya tetapi merupakan hasil belajar dalam waktu yang cukup lama¹⁰. Proses belajar tentang masalah kemasyarakatan (kepemimpinan) di Toraja khususnya di Toraja Mamasa, lebih banyak nampak pada saat upacara adat seperti Rambu Solo’ (kedukaan) dan rambu tuka’ (sukacita). Anak-anak biasanya dilibatkan dalam menyediakan daun-daunan untuk alas tempat memotong daging atau disuruh membakar hewan yang dikorbankan. Setelah meningkat dewasa sudah diberi kepercayaan untuk memotong dan membagi daging kepada orang yang hadir dalam upacara tersebut. Membagi daging sangat penting sebab dari sinilah seorang pemuda belajar mengenal dan membedakan orang menurut strata sosialnya. Seorang pemuda yang trampil dalam membagi daging sesuai dengan strata sosial seseorang pertanda ia punya bakat untuk memimpin masyarakat di masa yang akan datang. Proses pendidikan bagi mereka yang potensial terus dilanjutkan. Proses pendidikan atau pelatihan kepemimpinan yang sesungguhnya baru dimulai disini, yakni dengan melibatkan/mengikutkan dalam penyelesaian-penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat dan dalam upacara-upacara adat.

Selain proses belajar berupa keterampilan praktis seperti di atas, orang tua juga mengajar anak-anak dengan pengajaran yang merangsang imajinasi anak melalui cerita-cerita (dongeng). Dongeng-dongeng itu biasanya diceritakan pada saat santai menjelang tidur di malam hari atau waktu dalam perjalanan ke kebun. Walaupun makna dongeng itu tidak pernah dijelaskan tetapi setelah dianalisa ternyata nilai kemanusiaannya sangat dalam. Proses pendidikan ini berlangsung terus-menerus. Khususnya dalam bidang kepemimpinan, penggantian pimpinan dilakukan pada saat sang pemimpin tidak mampu menjalankan tugasnya. Ada banyak macam atau variasi dalam penggantian pemimpin¹¹. Ada kepemimpinan yang harus diwariskan kepada keturunan pemangku adat

(pemimpin) tersebut tetapi ada juga yang diangkat dari anggota suku yang bukan keturunan langsung dari pemimpin sebelumnya. Menjelang penyerahan tongkat estapet kepemimpinan, maka sang calon pemimpin akan mendapat semacam pelajaran terakhir dari yang akan digantikannya. Peristiwa itu disebut “disikkudui sadangna” yang arti hurufiahnya diludahi mulutnya. Artinya pemberian kata-kata nasihat yang merupakan kode etik dan rahasia dalam memimpin. Nasihat-nasihat yang berisi kode etik dan rahasia kepemimpinan itu hanya diberikan kepada yang akan dipilih dan tidak bisa disampaikan sembarangan kepada orang lain. Peristiwa pemberian nasihat yang hanya terjadi antara sang pemimpin dan pewarisnya itu disampaikan menjelang penyerahan tongkat estapet kepemimpinan. Upacara penyerahan tersebut ada bermacam-macam. Ada yang hanya dilakukan dengan penyerahan alat-alat atau simbol-simbol kepemimpinan yang dipakai dalam memimpin, tetapi ada juga yang harus dilakukan melalui semacam upacara perberkatan yang dalam bahasa daerah Toraja Mamasa disebut *ditada’*.

V.

Sejak Indonesia merdeka, bahkan sejak masa penjajahan Belanda, sistem pemerintahan lokal di tiap-tiap daerah telah mengalami perubahan. Negara Indonesia yang merupakan gabungan dari ratusan atau ribuan suku dan kerajaan tidak bisa mempertahankan sistem pemerintahan lama yang feodalistik. Suku-suku dan kerajaan-kerajaan harus tunduk kepada sistem pemerintahan yang baru dengan aturan dan undang-undangnya sendiri. Meskipun beberapa kali mengalami perubahan, tetapi selama kurang lebih lima puluh tahun negara ini mempraktekkan sistem pemerintahan yang sentralistik. Pilihan pada sistem pemerintahan yang sentralistik merupakan pilihan yang paling tepat di awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai latar belakang pemerintahan yang sangat beragam. Namun setelah melalui perjalanan yang panjang ternyata bahwa sistem yang sentralistik mulai dipertanyakan dalam membangun kebersamaan. Sistem pemerintahan yang sentralistik telah banyak mengalami perubahan. Bahkan di era reformasi ini sistem yang sentralistik tersebut dianggap sebagai sumber malapetaka bagi bangsa ini. Karena itu upaya pencarian suatu model yang terbaik dilakukan. Otonomi daerah merupakan pilihan untuk keluar dari permasalahan rumit yang membuat negara ini terpuruk setelah dilanda krisis multi dimensional. Walaupun ketetapan telah diambil namun masih sering ada yang mempertanyakan

sistem otonomi daerah ini. Keraguan pada umumnya berada disekitar kemungkinan bangkitnya raja-raja baru (baca: feodalisme modern) di daerah yang memakai gelar-gelar modern tetapi perilakunya sama dengan raja dalam masyarakat tradisional. Gejala seperti pencarian/pemberian gelar bangsawan tradisional kepada pemimpin modern dapat menjadi salah satu indikasi. Dalam pemberian gelar kebangsawanan, kedua belah pihak diuntungkan. Pihak penerima gelar diuntungkan sebab dengan adanya legitimasi dan pengakuan keraton diharapkan dapat menjadi pintu meraih dukungan dari rakyat yang masih sangat kuat dengan simbol-simbol tradisional. Sementara itu, pihak pemberi gelar diuntungkan oleh adanya relasi dengan pemimpin dalam elit modern. Keuntungan tersebut bisa dalam wujud perlindungan tetapi juga bisa berupa finansial. Berbeda dengan pihak yang masih bernada skeptis, Aminuddin Selle justru melihat sisi-sisi positif dari kepemimpinan tradisional. Baginya kepemimpinan tradisional justru harus mendapat perhatian dalam mengoptimalkan otonomi daerah.

“Kajian mengenai nilai-nilai budaya kepemimpinan elit lokal sebagai salah satu dimensi sosial budaya masyarakat dapat membantu rencana pembangunan yang diwarnai *stressing program* dan prioritas-prioritas untuk menjawab situasi konkret masyarakat. Sebaliknya jika pembangunan yang dilakukan secara drastis dengan mengabaikan kearifan tradisi dan nilai-nilai budaya masyarakat lokal akan menjadi problem bila menurut Peter L. Berger; menuntut korban manusia karena kurang mempertimbangkan dimensi sosial budaya yang menjadi bingkai laku hidup masyarakat”¹².

Terlepas dari pro kontra tentang otonomi daerah, yang jelas ialah bahwa peluang kebangkitan sistem kepemimpinan tradisional di berbagai daerah sangat besar. Simbol-simbol kekuasaan lama seperti gelar bangsawan, pakaian kebangsawanan, rumah dan lain-lain semakin hidup kembali dalam masyarakat termasuk dalam pemilihan pemimpin dalam pemerintahan tingkat lokal. Walaupun era ini adalah era reformasi tetapi masih ada saja sisa-sisa pikiran yang menolak jika yang memimpin suatu daerah tidak berasal dari keturunan “darah biru”. Memang harus diakui pula bahwa tidak semua yang ada dalam sistem kepemimpinan tradisional tidak baik. Pasti ada sisi positif atau sisi yang baik, tetapi ada pula yang sama sekali tidak relevan dengan situasi yang sangat menekankan nilai-nilai

demokratisasi. Sikap kritis harus terus dihidupkan baik terhadap kepemimpinan modern dan terlebih terhadap kepemimpinan tradisional.

VI.

Sikap kritis terhadap kepemimpinan tidak hanya perlu dihidupkan dalam kepemimpinan masyarakat secara umum tetapi dalam gerejapun sikap demikian mestinya dipupuk terus. Gereja yang lagi demam “membumi” di negerinya melalui apa yang disebut kontekstualisasi tidak “suci hama” dari godaan gaya kepemimpinan lama. Godaan ini umumnya tidak nampak secara terang-terangan tetapi mengambil wujud yang lain bagaikan “rusa berbulu domba”. Kasus penolakan penatua yang berasal dari kalangan strata rendah untuk memimpin ibadah di rumah keturunan bangsawan masih kerap didengar di berbagai daerah. Penolakan tidak hanya datang dari keturunan bangsawan tetapi terkadang penolakan dari sang penatua sendiri. Bahkan lebih heboh lagi sebab pernah terjadi seorang *parengnge* memindahkan hari minggu gara-gara penentuan waktu upacara adat telah disepakati bertepatan dengan hari minggu¹³.

Dengan demikian jelas bahwa baik dalam masyarakat secara umum maupun dalam gereja secara khusus realitas membuktikan bahwa pengaruh kepemimpinan lama (tradisional) masih tetap mempunyai pengaruh. Ia tidak hanya bisa dkenang akan eksistensinya pada masa lampau tetapi masih mempunyai pengaruh bahkan masih menjadi impian sebagian orang. Dalam rangka otonomi daerah dan kontekstualisasi kehidupan bergereja pengkajian secara sungguh-sungguh dan mendalam sangat dibutuhkan pada tiap-tiap daerah. Hanya dengan cara seperti itulah kita akan terhindar dari penyesalan anak cucu akibat kekeliruan yang dibuat pada masa kini.

“Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi; tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari” (Pengkhotbah 1:9)

Pdt. Marthen Manggeng, M.Th adalah dosen STT INTIM di bidang Pendidikan Agama Kristen

Catatan kaki:

¹ AA GN Ari Dwipayana, *Bangsawan dan Kuasa. Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota*, Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE) 2004, halaman 149

² DR. H. Aminuddin Salle, SH., MH., J. Bostan Daeng Mama'dja, Drs. Supriadi Hamdat, MA., *Rekaman Awal Kepemimpinan Elit Lokal. Karaeng Galesong*. Makalah.



³ T.O. Ihromi, *Adat Perkawinan Toraja Sa'dan dan Tempatnya Dalam Hukum Positif*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1981, halaman 59

⁴ Dalam masyarakat Toraja dikenal empat strata yang dikenal dengan istilah Tana'. Keempat Tana' tersebut adalah: a) Tana' Bulaan (Bulawan). Bulaan/ bulawan berarti emas, b) Tana' Bassi. Bassi artinya besi, c) Tana' Karurung. Karurung adalah tiang yang terbuat dari kayu enau, d) Tana' Koa-koa. Koa-koa adalah sejenis rumput yang biasa tumbuh di pinggir sungai.

⁵ AA GN Ari Dwipayana, *Bangsawan dan Kuasa. Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota*, Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE) 2004, halaman 25, 33-57.

⁶ John Campbell-Nelson. *Oikonomia Allah Sampai Ekonomi Manusia. Sebuah Catatan Historis*, Makalah (tidak diterbitkan).

⁷ Menurut informasi media massa bahwa molornya pengumuman menteri-menteri kabinet Indonesia Bersatu oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 20 Oktober 2004 sebab penentuan menteri-menteri bidang EKUIN sangat alot.

⁸ J.Tammu dan H.van der Veen, *Kamus Toraja - Indonesia*, Toraja, Yayasan Perguruan Kristen Toraja, "S.V" Rengnge' Cf. T.O.Ihromi, *Adat Perkawinan Toraja Sa'dan dan Tempatnya Dalam Hukum Positif*,

Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1981, halaman 24

⁹ H. Aminuddin Salle, J. Bostan Daeng Mama'dja, Supriadi Hamdat, Ibid.

¹⁰ Willian Stern salah satu ahli pendidikan modern mengatakan bahwa semua orang lahir dengan potensi yang diwarisi dari orang tuanya (sesuai pandangan Schopenhauer) tetapi potensi itu tidak akan berkembang dengan sendirinya tanpa adanya pendidikan.

¹¹ Dalam kehidupan masyarakat Toraja Mamasa ada beberapa pemimpin berdasarkan bidang kerjanya. Ada pemimpin khusus urusan pertanian yang disebut "So'bok". Pemimpin dalam upacara kedukaan ditangani oleh tiga pemimpin yaitu: "Tamattoe piso", tugasnya mengatur pembagian ukuran daging baik yang dipersembahkan maupun pembagiannya. "To ma'kada adalah semacam imam yang memimpin dalam persembahan. Sedangkan "To Mebalun" adalah pimpinan peratap.

¹² H. Aminuddin Salle, J. Bostan Daeng Mama'dja, Supriadi Hamdat, *Rekaman Awal Kepemimpinan Elit Lokal. Karaeng Galesong*. Makalah

¹³ Retno W., *Kepemimpinan Parengnge*, Skripsi Sarjana Teologi, STT INTIM Makassar, 1999

